



Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran

Lalu Arfa' am Andesa¹, Firdanigsih²

andesa@gmail.com, firdanigsih@gmail.com

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2024

Revised November 12, 2024

Accepted Januari 1, 2025

Available online 1 Januari, 2025

Kata Kunci: kejahatan; pelanggaran



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya metoda/pendekatan dan hasil penelitian terdahulu. Kejahatan biasanya memiliki dampak yang lebih terasa terhadap diri sendiri maupun orang lain dibandingkan pelanggaran, begitu juga sebaliknya pelanggaran biasanya memiliki dampak yang lebih kecil terhadap diri sendiri dan orang lain. Pelanggaran dan kejahatan sering terjadi di sekitar kita, oleh karena itu diperlukannya peningkatan kesadaran hukum, pelatihan penegak hukum, penegakan hukum yang teranfaran, fasilitas restoratif, reformasi hukum. Dengan menerapkan saran saran

tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran, serta meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

1. PENDAHULUAN

Setiap masyarakat membutuhkan aturan dan norma untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam sistem hukum, dua konsep yang sering dibicarakan adalah kejahatan dan pelanggaran, keduanya mencerminkan tindakan yang bertentangan dengan hukum, namun berbeda dalam sifat dan tingkat keseriusan sanksinya. Kejahatan biasanya dikaitkan dengan tindakan yang melanggar hak-hak dasar orang lain, seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan fisik. Sebaliknya, pelanggaran sering kali merujuk pada tindakan yang melanggar peraturan atau prosedur administratif, misalnya pelanggaran lalu lintas atau ketidakpatuhan pada regulasi tertentu, yang memiliki dampak lebih ringan dibandingkan kejahatan. Studi tentang perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran juga relevan untuk mendorong kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajibannya serta membangun budaya patuh hukum yang berkeadilan. Berdasarkan pentingnya pemahaman ini, pembahasan mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran menjadi topik yang menarik dan signifikan untuk dikaji lebih lanjut.

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum pidana dan dianggap merugikan masyarakat secara signifikan. Dalam konteks hukum, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindakan kejahatan dapat berupa tindakan yang dilakukan secara langsung, seperti pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan, maupun tindakan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti penipuan atau penggelapan. Kejahatan juga dapat dikategorikan dalam berbagai tingkatan, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat, tergantung pada dampak dan niat dari pelaku. Dalam sistem hukum, kejahatan dibedakan menjadi



dua kategori utama: kejahatan terhadap individu dan kejahatan terhadap masyarakat. Kejahatan terhadap individu meliputi tindakan yang merugikan orang lain secara langsung, seperti penganiayaan dan pencurian. Sementara itu, kejahatan terhadap masyarakat mencakup tindakan yang merugikan tatanan sosial, seperti peredaran narkoba dan korupsi. Pengelompokan ini penting karena menentukan jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan dan bagaimana sistem peradilan menangani kasus tersebut.

| 17

Proses hukum dalam penegakan kejahatan biasanya melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyelidikan oleh aparat penegak hukum hingga proses pengadilan. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Setelah proses penyelidikan, kasus tersebut diajukan ke pengadilan, di mana pelaku kejahatan diadili. Dalam proses ini, penting untuk membuktikan adanya niat jahat atau dolus dari pelaku, yang menjadi syarat utama untuk menjatuhkan hukuman. Pelanggaran hukum sering kali ditangani secara berbeda dibandingkan dengan kejahatan. Sanksi untuk pelanggaran biasanya lebih ringan, seperti denda atau peringatan, sedangkan sanksi untuk kejahatan bisa berupa hukuman penjara, denda yang lebih besar, atau bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, agar dapat memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam konteks sosial, kejahatan tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Tingkat kejahatan yang tinggi dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat, menciptakan ketidakamanan, dan menghambat perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku kejahatan merupakan aspek penting dalam upaya membangun masyarakat yang aman dan berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian pelanggaran

Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar norma, peraturan, atau undang-undang yang ditetapkan oleh suatu otoritas. Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran biasanya dianggap tidak seberat tindakan kriminal dan sering kali dikenakan sanksi yang lebih ringan. Pelanggaran dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk hukum, lalu lintas, lingkungan, dan administrasi. Misalnya, melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak mengenakan sabuk pengaman atau melanggar batas kecepatan, termasuk dalam kategori pelanggaran. Dalam konteks hukum, pelanggaran sering kali dibedakan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif biasanya ditangani oleh lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan tertentu, seperti pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan pemerintah. Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran administratif



dapat berupa denda, peringatan, atau pencabutan izin, tergantung pada sifat dan dampak pelanggaran tersebut.

Pelanggaran pidana, di sisi lain, meskipun lebih serius dibandingkan pelanggaran administratif, tetap dianggap kurang berat dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran pidana meliputi tindakan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau pelanggaran hukum yang tidak menyebabkan kerugian signifikan kepada orang lain. Sanksi untuk pelanggaran pidana dapat mencakup hukuman penjara yang lebih pendek, denda, atau kerja sosial. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran melalui kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat dapat membantu menurunkan angka pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Pendidikan tentang hukum dan peraturan yang berlaku menjadi salah satu upaya penting untuk membangun kesadaran tersebut. Dalam konteks sosial, pelanggaran yang terus menerus dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran secara adil dan konsisten, serta memberikan sanksi yang sesuai agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Pendekatan yang efektif terhadap penegakan hukum dapat membantu menciptakan budaya hukum yang lebih baik dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

b. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan sifat

Perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sifat tindakan yang dilakukan. Kejahatan sering kali dianggap sebagai tindakan yang lebih serius dan merugikan masyarakat secara luas, sedangkan pelanggaran cenderung dianggap sebagai tindakan yang kurang serius dan lebih bersifat administratif. Kejahatan biasanya melibatkan niat jahat (*mens rea*) dan berpotensi menyebabkan kerugian fisik, mental, atau material bagi individu atau masyarakat. Dalam banyak kasus, kejahatan memiliki dampak jangka panjang yang dapat mengubah tatanan sosial. Sifat kejahatan dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan individu tertentu tetapi juga dapat menciptakan ketidakamanan di masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, meningkatnya tingkat kejahatan dapat menyebabkan masyarakat merasa terancam dan berpotensi menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, kejahatan sering kali menjadi perhatian utama pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya menjaga keamanan publik.

Sebaliknya, pelanggaran lebih sering dianggap sebagai kesalahan administratif yang tidak melibatkan niat jahat dan tidak memiliki dampak sosial yang signifikan. Contoh pelanggaran termasuk melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor atau tidak membayar pajak tepat waktu. Pelanggaran ini umumnya tidak menyebabkan kerugian langsung bagi orang lain, meskipun tetap perlu ditindaklanjuti untuk menjaga ketertiban umum. Sifat pelanggaran juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang lebih bersifat teknis dan administratif, di mana sanksi yang dikenakan tidak setara dengan sanksi kejahatan. Misalnya, sanksi untuk pelanggaran administratif sering kali berupa denda atau peringatan, sedangkan sanksi untuk kejahatan dapat berupa hukuman penjara atau



denda yang lebih berat. Oleh karena itu, perbedaan dalam sifat dan konsekuensi hukum antara kejahatan dan pelanggaran sangat penting untuk dipahami.

c. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan sanksi

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat dari sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Sanksi merupakan konsekuensi hukum yang ditujukan kepada individu yang melakukan tindakan yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, kejahatan biasanya dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, mencerminkan sifat dan dampak tindakan tersebut. Sanksi untuk kejahatan sering kali mencakup hukuman penjara yang cukup lama. Misalnya, tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian dengan kekerasan dapat dikenakan hukuman penjara minimal beberapa tahun hingga seumur hidup, tergantung pada undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan dianggap lebih serius dan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu atau masyarakat.

Selain hukuman penjara, kejahatan juga dapat dikenakan denda yang substansial. Denda ini dapat berfungsi sebagai bentuk pengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dan sebagai pencegahan bagi pelaku dan masyarakat lainnya untuk tidak mengulangi tindakan serupa. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat mengenakan denda yang sangat tinggi untuk kejahatan tertentu, seperti pencucian uang atau korupsi, untuk menegaskan keseriusan pelanggaran tersebut. Di sisi lain, pelanggaran biasanya dikenakan sanksi yang jauh lebih ringan. Dalam banyak kasus, pelanggaran administratif, seperti pelanggaran lalu lintas, hanya dikenakan denda yang relatif kecil atau peringatan. Misalnya, seorang pengemudi yang melanggar batas kecepatan mungkin hanya perlu membayar denda, tanpa adanya konsekuensi lebih lanjut yang signifikan terhadap kebebasan atau status hukum mereka.

Pelanggaran yang bersifat administratif tidak memerlukan proses pengadilan yang rumit. Sebagai contoh, petugas kepolisian dapat memberikan tilang atau denda langsung kepada pelanggar tanpa perlu membawa kasus tersebut ke pengadilan. Hal ini membuat penanganan pelanggaran lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses penanganan kejahatan, yang sering kali memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam dan proses hukum yang panjang. Sanksi bagi pelanggar biasanya bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku, bukan untuk menghukum secara berat. Dengan demikian, tujuan dari sanksi pelanggaran lebih menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Ini berbeda dengan kejahatan yang lebih fokus pada penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan.

d. Cara mencegah kejahatan dan pelanggaran

1. Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas dalam Pencegahan Kejahatan

Keluarga memiliki peran utama dalam pembentukan karakter dan moral individu sejak usia dini. Lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, pengawasan yang baik, serta penerapan nilai-nilai moral dapat membantu membentuk sikap positif dan mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang. Orang tua sebagai role model memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan disiplin, rasa empati, dan pengendalian diri pada anak-anak mereka. Penerapan nilai-nilai ini akan memperkuat



pondasi moral individu sehingga mereka dapat membuat keputusan yang benar dan menjauhi perilaku kriminal (Hiariej, 2017).

Selain keluarga, komunitas juga berperan penting dalam mencegah kejahatan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Kegiatan sosial, olahraga, dan budaya yang melibatkan seluruh anggota komunitas dapat menjadi media yang efektif untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai. Komunitas yang aktif dan saling peduli dapat meningkatkan pengawasan sosial, di mana setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan adanya rasa saling mengawasi ini, individu cenderung berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain (Muladi & Arief, 2016).

Kerja sama antara keluarga dan komunitas juga dapat dilakukan melalui program penyuluhan atau pendidikan tentang dampak negatif dari perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan, atau tindakan kriminal lainnya. Dengan pengetahuan yang cukup, individu diharapkan lebih memahami konsekuensi dari tindakan kriminal dan dampaknya bagi diri mereka maupun masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga dan komunitas akan memberikan pemahaman yang komprehensif, sehingga individu dapat menjauhi perilaku yang berpotensi melanggar hukum (Soekanto, 2007).

Sinergi antara keluarga dan komunitas menciptakan dukungan moral yang kuat bagi individu dalam mengambil keputusan yang tepat. Individu yang merasa diperhatikan dan didukung oleh lingkungannya memiliki kecenderungan untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Rasa keterikatan sosial ini membentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, pemberdayaan peran keluarga dan komunitas merupakan solusi yang efektif dalam mencegah kejahatan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan moral individu dan komunitas secara keseluruhan (Sudarto, 2002).

2. Pendidikan Karakter dalam Sistem Pendidikan untuk Mencegah Kejahatan

Pendidikan karakter dalam sistem pendidikan formal dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mencegah kejahatan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai etika, empati, serta tanggung jawab sosial pada siswa sejak usia dini. Melalui pembelajaran yang mencakup materi pendidikan karakter, siswa akan belajar untuk menghargai hak orang lain dan memahami dampak dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah juga dapat membantu siswa mengembangkan kontrol diri yang baik, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang melanggar hukum (Lickona, 2018).

Sekolah juga dapat mengintegrasikan program-program ekstrakurikuler yang positif dan mendidik, seperti kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Program ini tidak hanya membantu mengembangkan minat dan bakat siswa tetapi juga meningkatkan kemampuan interpersonal dan kolaborasi. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan yang membangun kerja sama dan kedisiplinan, mereka akan terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif serta mendapatkan pengalaman positif yang membentuk karakter. Pengalaman berharga ini akan memperkuat mentalitas siswa untuk menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain (Nucci & Narvaez, 2014).



Lebih lanjut, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat memperkuat pendidikan karakter. Sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dan tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan seminar atau penyuluhan terkait pencegahan kejahatan. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar, siswa akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang lebih kuat. Keterlibatan semua pihak dalam memberikan pendidikan karakter ini sangat efektif dalam menciptakan generasi muda yang memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang tinggi (Berkowitz & Bier, 2005).

| 21

3. Penggunaan Teknologi dalam Pencegahan Kejahatan

Perkembangan teknologi memberikan peluang baru dalam upaya pencegahan kejahatan, seperti pengawasan berbasis CCTV, pemantauan sistem keamanan digital, hingga penggunaan analitik data untuk mendeteksi potensi ancaman. Teknologi CCTV memungkinkan aparat dan masyarakat untuk memantau lokasi-lokasi rawan kejahatan secara real-time, sehingga dapat segera mengambil tindakan jika terjadi tindakan mencurigakan. Selain itu, rekaman CCTV dapat menjadi bukti yang membantu aparat dalam menangkap pelaku tindak kejahatan, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan (Goold, 2004).

Selain CCTV, pemanfaatan teknologi analitik data juga efektif dalam mencegah kejahatan. Melalui analitik data, aparat dapat mengidentifikasi pola-pola kriminal yang sering terjadi pada waktu atau lokasi tertentu. Teknologi ini memungkinkan pengalokasian sumber daya dan patroli yang lebih efektif, sehingga potensi kejahatan dapat ditekan. Misalnya, data statistik menunjukkan area-area dengan tingkat kejahatan tinggi, yang kemudian dapat difokuskan untuk pengawasan yang lebih intensif. Penggunaan teknologi ini memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dalam mencegah dan mengantisipasi tindak kriminal (Ratcliffe, 2016).

Penerapan teknologi dalam pencegahan kejahatan juga dapat diperkuat dengan peran serta masyarakat, melalui aplikasi pelaporan cepat atau sistem keamanan berbasis komunitas. Aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian atau perilaku mencurigakan secara langsung kepada pihak berwenang. Dengan kemudahan akses ini, respon terhadap situasi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan teknologi ini menciptakan iklim pengawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam menjaga keamanan lingkungan (Yar, 2013).

4. SIMPULAN

Jadi kejahatan dan pelanggaran adalah dua hal yang berbeda karena memiliki tingkatan, sanksi, serta dampak yang berbeda. Kejahatan biasanya memiliki dampak yang lebih terasa terhadap diri sendiri maupun orang lain dibandingkan pelanggaran, begitu juga sebaliknya pelanggaran biasanya memiliki dampak yang lebih kecil terhadap diri sendiri dan orang lain. Pelanggaran dan kejahatan sering terjadi di sekitar kita, oleh karena itu diperlukannya peningkatan kesadaran hukum, pelatihan penegak hukum, penegakan hukum yang teranfaran, fasilitas restoratif, reformasi hukum. Dengan menerapkan saran saran tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran, serta meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap hukum yang berlaku



DAFTAR PUSTAKA

- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). *What works in character education*. *Journal of Research in Character Education*, 3(1), 29-48.
- Clarke, R. V. (2001). *Situational crime prevention: Successful case studies*. Harrow and Heston.
- Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2017). *Correctional theory: Context and consequences* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Friedman, L. M. (2005). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Goold, B. (2004). *CCTV and policing: Public area surveillance and police practices in Britain*. Oxford University Press.
- Hadi, S. (2020). "Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Harlina, L. (2018). "Aspek Sosial Kejahatan dan Dampaknya terhadap Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hukum Pidana Indonesia. (2020). *Jakarta: Pustaka Hukum*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2020).
- Lickona, T. (2018). *Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues*. Touchstone.
- MacCoun, R. J., & Tyler, T. R. (1988). *The social psychology of procedural justice*. Springer.
- Muladi, & Arief, B. N. (2016). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyadi, E. (2018). "Pelanggaran dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Mulyadi, E. (2019). "Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran." *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Nasution, H. (2019). "Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nucci, L., & Narvaez, D. (2014). *Handbook of moral and character education*. Routledge.
- Ratcliffe, J. H. (2016). *Intelligence-led policing*. Routledge.
- Ryan, K., & Bohlin, K. E. (1999). *Building character in schools: Practical ways to bring moral instruction to life*. Jossey-Bass.
- Sembiring, R. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Administrasi*. Medan: USU Press.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (2002). *Hukum dan masyarakat*. Rajawali Pers.
- Surya, E. (2019). "Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Yar, M. (2013). *Cybercrime and society* (2nd ed.). SAGE Publications.